

TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA GKR Hemas: Jangan Merasa yang Paling Benar



KR-Devid Permana

GKR Hemas (tengah) menyampaikan sosialisasi Pancasila.

YOGYA (KR) - Pancasila adalah dasar negara. Sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi tentunya pemahaman atas Ketuhanan ini tidak boleh hanya berdasarkan satu kelompok saja, yang merasa paling benar dan merasa paling berhak masuk surga.

Demikian dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dalam acara Sosialisasi Pancasila di Ruang Serbaguna, Kantor DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Rabu (17/3).

Sosialisasi menghadirkan pembicara lain Ketua Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta Ir Lestanta Budiman MHum, Subkhi Ridhlo, Widihaso Wasana Putra dan Joko Suryanto dari Kesbangpol DIY.

Menurut Hemas, tidak perlu membawa aliran agama baru dengan pandangan baru yang justru akan merusak persatuan dan kesatuan. Jangan lupa bahwa Pancasila juga menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Biarkan mereka yang beragama dan beribadah dengan baik dapat men-

jalankan keyakinannya dengan tenang, tanpa terganggu oleh kelompok intoleran dan radikal yang selalu merasa benar sendiri," ujar Hemas.

Di Yogya, semangat Pancasila dan semangat persatuan dan kesatuan terwujud dalam rasa tepa selira, budaya toleransi, sopan santun, *mikul dhuwur mendhem jero*. Hemas mengingatkan, dalam menghadapi masalah intoleransi dan radikalisme hendaknya berpegang kepada tiga hal. Yaitu jangan pernah keluar dari budaya adhilihung Yogya. Jangan memperlakukan dengan cara yang buruk, jangan ikut menjadi kasar atau tidak sopan.

"Segala tindakan kita harus berdasarkan sifat luhur, budaya, dan kearifan Yogya," katanya.

Selain itu, lanjut Hemas, utamakan pendekatan persuasif melalui berdiskusi. "Bila kita memberikan penjelasan secara masuk akal dan sopan, mereka akan mengerti. Banyak orang yang terpapar radikalisme sebenarnya merupakan orang yang baik, hanya saja belajar kepada guru yang salah," pungkasnya. (Dev)-f

SATLAKAR DISOSIALISASIKAN KE WILAYAH

Meski Terbatas, Pembangunan Hidran Kampung Digulirkan

YOGYA (KR) - Pembangunan hidran kampung yang sempat tertunda pada tahun 2020 lalu, dipastikan kembali digulirkan tahun ini. Akan tetapi volumenya masih terbatas karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogya Anggoro Sulisty, menjelaskan tahun ini baru ada dua titik lokasi yang akan dibangun hidran kampung.

"Tahapannya sudah diajukan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Volumennya memang masih terbatas dengan total nilai Rp 1,4 miliar melalui APBD yakni di Purwodiningrat dan Ngadinatan. Tetapi ke depan akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan DED yang telah siap," urainya, Rabu (17/3).

Pembangunan hidran kampung sudah digulirkan sejak tahun 2017. Program tersebut menjadi kebutuhan untuk antisipasi risiko musibah ke-

bakaran di wilayah. Hal ini karena tingkat kepadatan penduduk di Kota Yogya terus meningkat. Di samping itu banyak wilayah yang akses masuk permukimannya tidak bisa dilalui oleh armada pemadam kebakaran karena terlalu sempit.

Anggoro mengatakan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga meningkatkan risiko bencana kebakaran. Sehingga dibutuhkan sarana atau infrastruktur untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga di wilayah. "Hidran kampung itu juga hasil dari musrenbang di wilayah maupun pokok pikiran dewan. Harapan nanti ke depan setiap RT terfasilitasi hidran kampung," imbuhnya.

Kendati demikian, hidran kam-

pong yang sudah terbangun di wilayah harus mendapat perawatan secara rutin. Oleh karena itu komitmen dari wilayah sangat dibutuhkan sehingga ada petugas di wilayah yang turut ditunjuk untuk mengelola hidran kampung.

Selain itu, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogya tahun ini juga tengah menyosialisasikan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di tiap kecamatan dan kelurahan. Targetnya, pada tahun 2023 mendatang setiap wilayah minimal sudah terbentuk satu Satlakar. Tujuannya ialah membantu dinas untuk pengelolaan hidran kampung serta jembatan informasi dan koordinasi kejadian kebakaran di wilayahnya.

"Misal nanti ada kejadian kebakaran di wilayah, maka Satlakar bisa membukakan jalan, menunjukkan arah dan titik dimana ada hidran hingga mengkoordinasikan di tingkat RT atau RW," urainya. (Dhi)-f

MINGGU DEPAN SASAR ASN

40.057 Warga Berhasil Divaksin

YOGYA (KR) - Proses percepatan realisasi vaksinasi Covid-19 di Kota Yogya sangat bergantung pada ketersediaan vaksin yang disuplai oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini tercatat ada 40.057 warga yang berhasil divaksin di Kota Yogya.

Menurut Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, warga yang sudah divaksin tersebut bukan seluruhnya penduduk Kota Yogya. "Siapa pun yang beraktivitas di sini kan menjadi tanggungan kita. Seperti yang di area Gumaton (Tugu, Malioboro dan Kraton) itu kan banyak warga luar namun kita vaksinasi secara massal," jelasnya, Rabu (17/3).

Total 40.057 warga yang divaksin tersebut terdiri dari 5.783 warga lansia, 22.474 warga masyarakat publik dan selebihnya dari tenaga kesehatan, yang berhasil disuntik untuk dosis pertama. Sedangkan yang sudah menjalani suntikan dosis kedua mencapai 13.762 warga. Terdiri dari 36 orang lansia, 4.098 warga masyarakat publik dan selebihnya tenaga kesehatan.

Heroe menyebut, realisasi lansia terlihat masih rendah salah satunya karena durasi penyuntikan untuk dosis kedua lebih lama yakni hingga 28 hari. Berbeda dengan masyarakat umum usia 18-59 tahun yang hanya berjarak 14 hari dari suntikan dosis pertama.

Di samping itu, banyak lansia yang sudah berhasil terdaftar namun datanya tidak langsung diserahkan ke daerah. "Kita ini kan tidak bisa mengakses data dari pusat. Menunggu kiriman datanya saja," katanya.

Sementara tahapan vaksinasi, saat ini masih menyelesaikan suntikan dosis kedua hasil vaksinasi massal pada 1-6 Maret 2021 lalu. Akan tetapi minggu depan mulai 22 hingga 27 Maret 2021 akan mulai menasar jajaran aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai teknis baik di lingkungan Pemkot Yogya maupun instansi vertikal. Totalnya mencapai 11.071 warga termasuk guru dan tenaga kependidikan. (Dhi)-f

PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Sepuluh Sekolah Jadi Percontohan

YOGYA (KR) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan proses pembelajaran tatap muka bisa dilakukan pada Juli mendatang. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY berharap program vaksinasi bisa segera diselesaikan tepat waktu. Karena jika semua guru sudah divaksin, selain bisa merasa lebih nyaman, proses pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik.

"Kalau soal pendataan secara prinsip tidak ada masalah karena sudah dilakukan jauh-jauh hari dan dikirim ke Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan saja pelaksanaannya lancar dan ketersediaan vaksin mencukupi. Sehingga sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka, semua guru sudah mendapatkan vaksin. Harapannya semua warga sekolah di luar siswa, bisa segera divaksin dan mengurangi risiko terhadap penularan Covid di lingkungan pendidikan," kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya MPd di

Yogyakarta, Rabu (17/3).

Dikatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di DIY akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi pembelajaran tatap mukanya menggunakan konsep terbatas (campuran) atau menggunakan daring dan luring. Begitu pula dengan waktu pembelajaran tatap muka rencananya tidak akan dilakukan sampai sore tapi bertahap (tahap awal 3 jam). Guna memastikan keamanan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, rencananya untuk tahap awal akan dilaksanakan di 10 sekolah.

"Sepuluh sekolah akan dijadikan percontohan pembelajaran tatap muka. Tentunya sebelum pembelajaran tatap muka guru-guru di sekolah tersebut harus sudah mendapatkan vaksin. Karena saat ini vaksinasi sudah mulai dilakukan termasuk untuk guru-guru SMA/SMK, saya optimis target yang sudah ditentukan bisa terpenuhi," terangnya. (Ria)-f

MUSRENBANG SAMPAH LIBATKAN WARGA

Yogya Kaji Pengadaan Insinerator Buatan Pindad

YOGYA (KR) - Kota Yogya kini tengah mengkaji pengadaan insinerator buatan PT Pindad. Insinerator merupakan alat pembakar sampah untuk mengolah limbah padat menjadi gas atau abu.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Sugeng Darmanto, persoalan sampah sudah masuk dalam agenda musrenbang tematik tahun ini. "Namanya musrenbang sampah, dan warga dilibatkan. Kebanyakan sampah kan selalu menjadi keluhan masyarakat. Solusi untuk menanganinya kalau terkait pembuangan selalu berkaitan dengan pihak luar, terutama TPA Piyungan. Tetapi untuk pengurangan dan penanganan juga harus ada aspek internal," urainya, Rabu (17/3).

Aspek internal yang dimaksud ialah penguatan kapasitas baik yang dilakukan oleh rumah tangga maupun unsur pemerintah. Apalagi ketika TPA Piyungan harus kerap dilakukan penutupan, aspek harus benar-benar dapat diperkuat. Salah satunya yang kini tengah dikaji ialah pengadaan insinerator buatan PT Pindad.

Sugeng menjelaskan, PT Pindad sudah

menawarkan insinerator yang sifatnya mobile. Harganya mencapai sekitar Rp 1,5 miliar dengan kapasitas 2 ton yang dibakar dalam waktu 10 jam. "Kita masih menghitung efektivitasnya agar bisa digunakan untuk pembakaran secara mobile di beberapa depo," imbuhnya.

Rencana pengadaan itu pun masih dibahas secara lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga belum diputuskan apakah sepakat untuk melakukan pengadaan atau justru merakit sendiri. Kendati demikian, alat tersebut akan efektif jika TPA Piyungan terjadi penutupan sementara. Sehingga untuk menekan tumpukan sampah maka bisa dilakukan pembakaran di tempat menggunakan insinerator.

Akan tetapi kinerja alat itu pun dinilai cukup lama serta kapasitasnya masih kecil. Hal ini karena sampah di TPS rata-rata diangkut menggunakan dua armada dengan debit tujuh ton. "Harapan kita kapasitas insinerator bisa sampai lima ton. Kalau yang dari Pindad itu hasilnya menjadi abu dan bisa kita olah menjadi pupuk kompos karena kandungan karbonnya sudah terpisah," urainya. (Dhi)-f

CERMINAN KEISTIMEWAAN DIY

Ujung Tombak Keluarga Hadapi Pandemi, Gerakan PKK Perlu Reaktivasi

YOGYA (KR) - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di DIY harus menjadi ujung tombak dari persoalan kesehatan di dalam keluarga menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu aktivasi ulang gerakan PKK terutama di bidang penanganan penyakit menular di seluruh kabupaten/kota di DIY secara simultan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Gerakan tersebut sekaligus mencerminkan Keistimewaan DIY di mana warganya yang istimewa dan mentaati perintah Gubernur DIY panutan warga DIY.

Ketua TP PKK DIY GKR Hemas mengatakan, TP PKK harus bisa menjadi ujung tombak persoalan kesehatan dalam keluarga di masa pandemi ini. Oleh karena itu, ibu-ibu rumah tangga maupun para perempuan di DIY sudah melakukan gerakan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. TP PKK berkeinginan bisa lebih melibatkan seluruh perempuan di DIY sampai dasawisma agar konsisten bergerak mulai dari lingkungan sampai masuk ke dalam rumah melakukan gerakan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

"Saya agak *ngome!* kok PKK tidak disentuh untuk bergerak ke bawah, belum ada yang menyentuh ibu-ibu agar bergerak signifikan hingga saat ini perlu melibatkan TP PKK untuk menggerakkannya. Gerakan ini tidak hanya terjadi di DIY saja, tetapi di seluruh Indonesia sebab kalau ada yang datang dari luar DIY tetap akan berimbas," ujarnya selaku Keynote Speech dalam Peringatan ke-49 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK bertema "Keluarga Pelopor Perubahan



KR-Fira Nurfiani

GKR Hemas didampingi GKBRAy Paku Alam X.

Menuju Indonesia Maju' di Gedung Pracimosono Kepatihan, Rabu (17/3)

GKR Hemas menegaskan TP PKK DIY tengah membangun strategi guna melindungi para keluarga DIY untuk bisa melakukan antisipasi terkait Covid-19. Terlebih mendekati mudik Lebaran sanak saudara dan keluarga dari luar DIY juga perlu diantisipasi di keluarga yang dituju. Terlebih dengan adanya Jaga Warga di DIY harus benar-benar berperan optimal dalam mendata setiap warga yang datang dari luar daerah yang masuk di lingkungannya.

"Saya kira dengan DIY yang istimewa seharusnya masyarakatnya harus lebih istimewa. Karena mereka tetap bisa menjaga dan mentaati apa yang telah diperintahkan Gubernur DIY menjadi panutan yang sangat diharapkan bagi warga DIY," tandasnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, keluarga wajib berfungsi dengan baik, karena dalam keluarga generasi baru memperoleh nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan harapan masyarakat. Berfungsinya keluarga dengan baik merupakan hal utama bagi kelangsungan

suatu masyarakat. Hal inilah yang diharapkan bisa selalu menjadi pertimbangan utama dan pertama dalam setiap gerak PKK.

"Lewat keluarga masyarakat bisa memperoleh dukungan yang diperlukan. Sebaliknya, keluarga hanya dapat bertahan jika didukung oleh masyarakat luas. Dengan demikian, keluarga dan masyarakat harus saling mendukung dalam banyak hal, di mana PKK dapat melakukan peran sentralnya," katanya.

Menurut Sultan, sampai saat ini sudah terbukti bahwa PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan kaum perempuan sebagai mainstream dan motor penggerakannya. Untuk itu dirinya berharap agar PKK dapat menunjukkan diri sebagai gerakan yang memang inspiratif dan adaptif terhadap situasi lokal. Hal ini menunjukkan pula bahwa PKK mempunyai misi dan visi jauh ke depan, antisipatif, sekaligus aspiratif terhadap dinamika perubahan, terutama oleh dampak Covid-19.

"Keluarga DIY harus siap memasuki keadaan baru (new normal) yang menghadirkan tantangan berbeda dari suasana keluarga dan

masyarakat pada masa sebelumnya. Dalam mengantisipasi tantangan dan peluang terhadap kiprah dan citra PKK pada masa pandemi, sudah sewajarnya jika PKK dapat secara objektif mengadakan penilaian menyeluruh untuk mencermati berbagai aspek perubahan yang berkembang di masyarakat," terangnya.

Ketua Panitia HKG PKK ke-49 Tahun 2021 DIY GKBRAy Paku Alam X mengatakan, puncak peringatan HKG PKK ke-49 tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga beberapa kegiatan diberikan secara simbolis. Kegiatan peringatan HKG PKK Tahun 2021 yang dilakukan di antaranya, pemberian penghargaan kader PKK sebanyak 100 paket. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kader di tingkat Kelurahan yang telah berkarya selama 10 tahun tanpa henti dan diutamakan sebagai kader penggiat Covid-19.

"Kegiatan lainnya, pemberian bantuan modal usaha peningkatan pendapatan dalam keluarga diberikan kepada 50 kelompok masing-masing Rp 2 juta. Bantuan modal ini untuk mendorong agar usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi," ungkapnya.

Pada peringatan HKG PKK ke-49 Tahun 2021 ini diselenggarakan pula Webinar Kesehatan dengan narasumber Sri Aminah selaku ibu rumah tangga, penggiat PKK dan dokter anak, Rimawan Pradipto selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dan inisiator Sonjo serta Tirta Mandira Hudi selaku dokter, relawan Covid-19 dan pegiat UMKM.

(Ira/Ria)-f